

Nomor Katalog: 9201001.8207

Indikator Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Nomor Katalog: 9201001.8207

Indikator Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN PULAU MOROTAI 2022

Katalog : 9201001.8207

Ukuran Buku : 18,2 cm × 25,7 cm

Jumlah Halaman : viii + 39 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai

Gambar Kulit:

Objek Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai

Dicetak Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN PULAU MOROTAI 2022

Tim Penyusun:

Penanggungjawab :
Hasnim Saadi, SE.

Penyunting :
Nisa Budi Noorfadila, S.Tr.Stat.

Penulis :
Nisa Budi Noorfadila, S.Tr.Stat.

Tata Letak:
Nisa Budi Noorfadila, S.Tr.Stat.

Kata Pengantar



Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendaknya Publikasi tahunan “Indikator Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai

2022” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penerbitan Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data di Kabupaten Pulau Morotai terutama yang terkait dengan bidang ekonomi.

Publikasi ini berisi data dari beberapa indikator ekonomi. Penyajian publikasi ini berbentuk penjelasan yang disertai dengan table dan ulasan sederhana mengenai perkembangan indikator ekonomi Pulau Morotai selama tahun 2012.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, dalam mengevaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan selama ini. Selain itu, publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi serupa di masa yang akan datang.

Pulau Morotai, September 2023
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pulau Morotai

Hasnim Saadi

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Bab 1 Perkembangan Perekonomian	1
Bab 2 Pembangunan Sosial dan Manusia	15
Bab 3 Keuangan Daerah	33

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pulau Morotai, 2020-2022.....	24
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pulau Morotai, 2022	28
Tabel 2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pulau Morotai, 2022	29
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pulau Morotai, 2022	28
Tabel 3.1 Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022	37
Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022	38
Tabel 3.3 Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 (Miliar Rupiah)	39

Daftar Grafik

Halaman

Grafik 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah), 2018-2022	4
Grafik 1.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2021	5
Grafik 1.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2022	6
Grafik 1.4 Perkembangan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2018-2022	7
Grafik 1.5 Perkembangan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2018-2022	8
Grafik 1.6 Perbandingan Laju Produk Domestik Regional Bruto Indonesia, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai Menurut atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2018-2022	10
Grafik 1.7 Laju Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Beberapa Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2022	11
Grafik 1.8 Laju Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Beberapa Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2018-2022	12

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pulau Morotai, 2022	18
Grafik 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Morotai, 2013-2022.	19
Grafik 2.3 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pulau Morotai (tahun), 2013-2022	20
Grafik 2.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pulau Morotai (tahun), 2013-2022	21
Grafik 2.5 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Riil Kabupaten Pulau Morotai (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2013-2022.	22
Grafik 2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulau Morotai, 2018-2022	30

BAB 1

TINJAUAN PEREKONOMIAN

<https://morotab.bps.go.id>

Perkembangan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19

Setelah mengalami keterpurukan selama dua tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Pulau Morotai perlahan mengalami pemulihan yang tercermin dari pertumbuhan positif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi tersebut dimiliki residen ataupun non-residen. PDRB disajikan atas dasar harga berlaku (nominal) dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Pemulihan ini tidak lepas dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan yang responsif dan adaptif, sehingga laju perekonomian perlahan tumbuh. Selain itu, sentimen positif masyarakat di tengah fluktuasi penyebaran Covid-19 berdampak pada peningkatan konsumsi akhir rumah tangga dan peningkatan produksi dari berbagai sektor lapangan usaha di Kabupaten Pulau Morotai.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, antara lain:

1. vaksinasi massal guna menekan penyebaran virus dan memungkinkan pembukaan kembali aktivitas ekonomi;
2. pemberian stimulus ekonomi untuk sektor-sektor terdampak, melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga serta insentif bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM);
3. bantuan berupa aset seperti *homestay* dan kafe untuk sektor pariwisata, benih tanaman untuk sektor pertanian, kapal dan perahu untuk sektor perikanan, serta lain-lain yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Beberapa kebijakan tersebut perlahan memberikan timbal balik positif terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Pulau Morotai. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian secara keseluruhan.

Nilai PDRB Kabupaten Pulau Morotai atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 1,75 triliun rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Pulau Morotai selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah), 2018-2022



sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Dari grafik di atas, terlihat bahwa PDRB mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir baik nominal maupun riil. PDRB sempat melandai pada tahun 2020 dan 2021 secara riil, namun secara nominal cukup meningkat akibat pengaruh peningkatan harga di berbagai komoditas. Bagaimanapun juga, PDRB kembali menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022 baik nominal maupun riil.

Berdasarkan harga berlaku, PDRB meningkat dari 1,64 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 1,75 triliun rupiah pada tahun 2022. Bagaimanapun juga, peningkatan nilai PDRB nominal tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan produksi, namun juga dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas barang/jasa. Di sisi lain, peningkatan PDRB riil hanya mencerminkan peningkatan produksi tanpa dipengaruhi adanya inflasi.

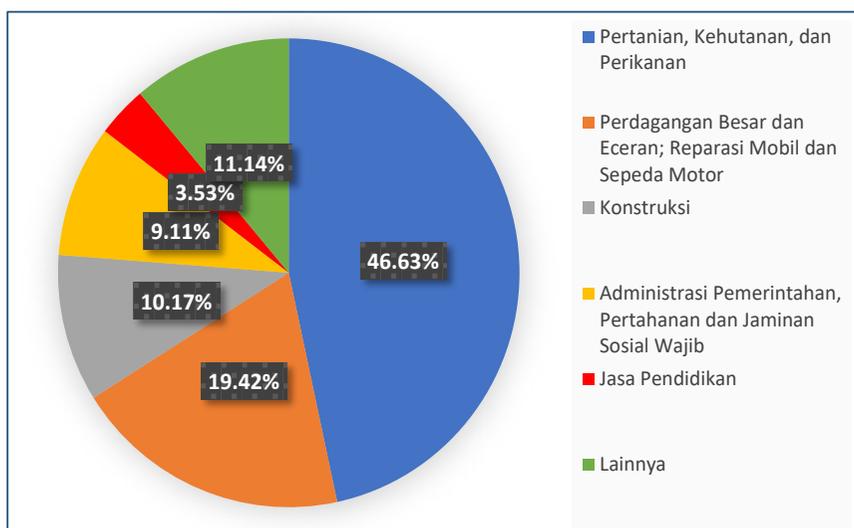
Dari sisi produksi, peningkatan PDRB pada tahun 2022 merupakan imbas dari intensifikasi produksi di berbagai lapangan usaha khususnya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor perdagangan, serta konstruksi.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran memperkuat bahwa PDRB tumbuh merupakan dampak dari pelonggaran konsumsi akhir rumah tangga yang sebelumnya sempat tertahan akibat kecenderungan masyarakat untuk menabung selama dua tahun sebelumnya. Selain itu, Pulau Morotai sedang mengalami fase pembangunan daerah secara intensif baik dari segi infratraktur maupun pembangunan manusia. Kebijakan pelonggaran pembatasan transportasi juga dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan berbagai *event* nasional sehingga menjadi *multiplier effect* yang positif bagi perekonomian lokal. Dengan demikian, pengeluaran akhir pemerintah serta pembentukan modal tetap bruto merupakan komponen penting yang menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Morotai.

Struktur Perekonomian

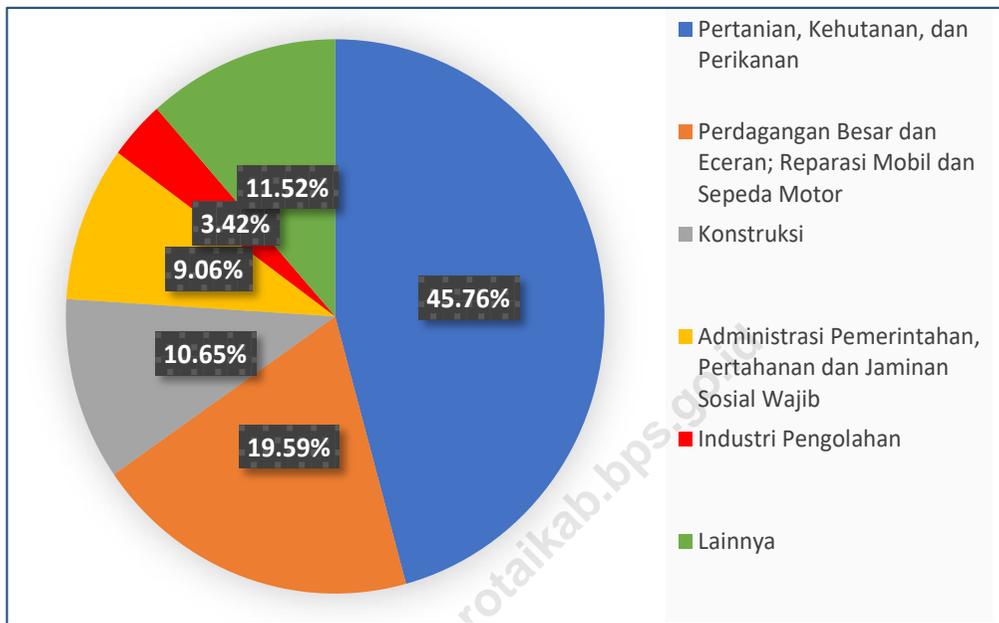
Selain melihat fluktuasi, tinjauan perekonomian dapat dilakukan dengan melihat struktur ekonomi guna mengidentifikasi kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Indikator ini memberikan informasi penting tentang kategori Lapangan Usaha mana yang merupakan penopang utama perekonomian di suatu wilayah. Penyajian indikator struktur ekonomi dari waktu ke waktu dapat menunjukkan ada tidaknya perubahan struktur perekonomian di suatu wilayah.

Grafik 1.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2021



sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Grafik 1.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2022

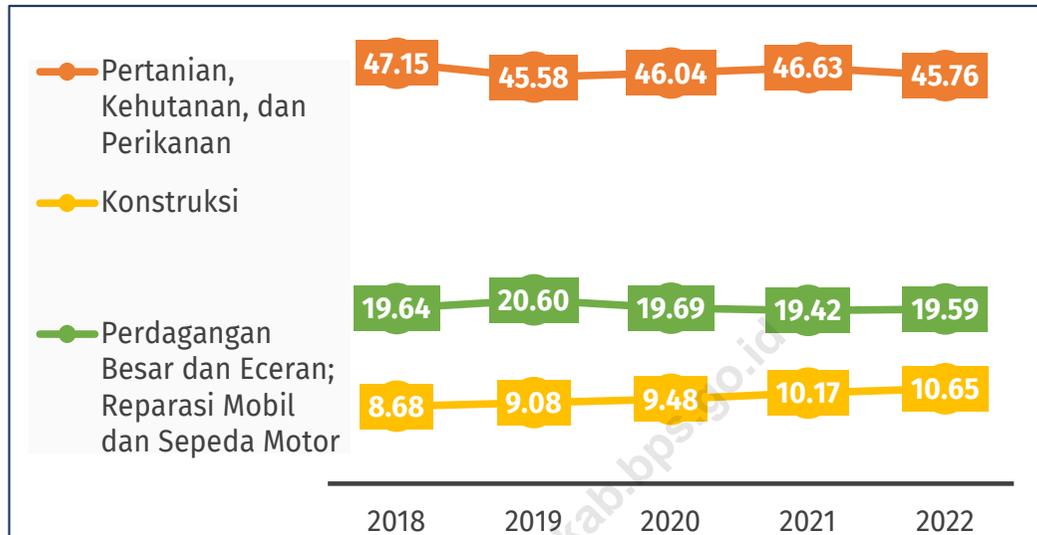


sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan struktur terhadap empat besar lapangan usaha di Pulau Morotai dari tahun 2021 ke 2022. Pergeseran struktur ekonomi berlangsung pada lapangan usaha yang mempunyai kontribusi kecil dan sedang terhadap perekonomian. Salah satunya adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan yang sebelumnya menempati posisi kelima tergeser oleh lapangan usaha Industri Pengolahan.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Pulau Morotai, yaitu sebesar 45,76 persen. Hal ini sejalan dengan mata pencaharian penduduk usia kerja di Pulau Morotai yang mayoritas adalah petani dan nelayan. Kontributor terbesar selanjutnya adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,59 persen, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,65 persen. Selanjutnya adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,06 persen. Dan yang kelima adalah lapangan usaha Industri Pengolahan yang meningkat hingga 3,42 persen.

Grafik 1.4 Perkembangan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2018-2022

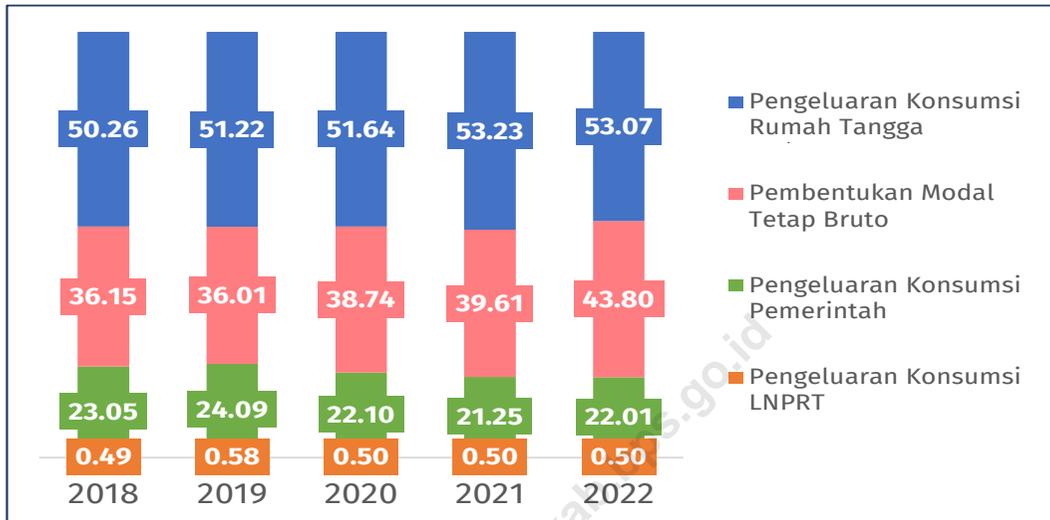


sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Meskipun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB selama bertahun-tahun, perannya menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2020. Sektor ini pada tahun 2018 memiliki kontribusi 47,15 persen sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 45,76 persen. Penurunan ini diikuti oleh semakin meningkatnya peranan lapangan usaha lain terhadap perekonomian, antara lain lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang cenderung kembali meingkat di tahun 2021. Di sisi lain, lapangan usaha konstruksi secara konsisten meningkat sejak lima tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan upaya intensifikasi pembangunan infrastruktur dan bangunan publik maupun privat di Pulau Morotai.

Selain itu, beberapa faktor yang menjadi penyebab penurunan kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tersebut antara lain: 1) berkurangnya luas lahan pertanian dan perkebunan; 2) lambatnya kenaikan harga komoditas makanan dibandingkan dengan kenaikan harga komoditas secara umum; 3) perubahan iklim tak menentu yang menyebabkan seringnya gagal panen; 4) serta kurangnya sarana penyimpanan komoditas. Perubahan struktur ekonomi untuk seluruh lapangan usaha dapat dilihat di Lampiran XX.

Grafik 1.5 Perkembangan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 2018-2022



sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Dari sisi pengeluaran, lebih dari 50 persen PDRB Kabupaten Pulau Morotai digunakan untuk memenuhi kebutuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) selama lima tahun terakhir. Sementara itu, konsumsi akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), Perubahan Inventori, dan Net Ekspor selalu menjadi komponen yang memiliki kontribusi kecil terhadap total PDRB dibandingkan komponen pengeluaran lainnya

Selanjutnya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kecenderungan peningkatan kontribusi yang merupakan dampak dari peningkatan penambahan aset tetap, baik bangunan maupun non bangunan. PMTB itu sendiri menjelaskan tentang bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Dari data lima tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa investasi mengalami pertumbuhan yang paling signifikan di antara komponen pengeluaran lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pulau Morotai memiliki iklim dan kondisi investasi yang cukup baik. Hal ini terealisasikan melalui: pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai dan Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2019; relokasi pasar tradisional ke Kawasan Morotai *Central Business District* (CBD) dan beberapa area ruko, foodcourt serta BUMDES pada tahun 2021; pembangunan Morotai Study and Sport Center, Kawasan Religi Morotai, hibah Sarhunta untuk

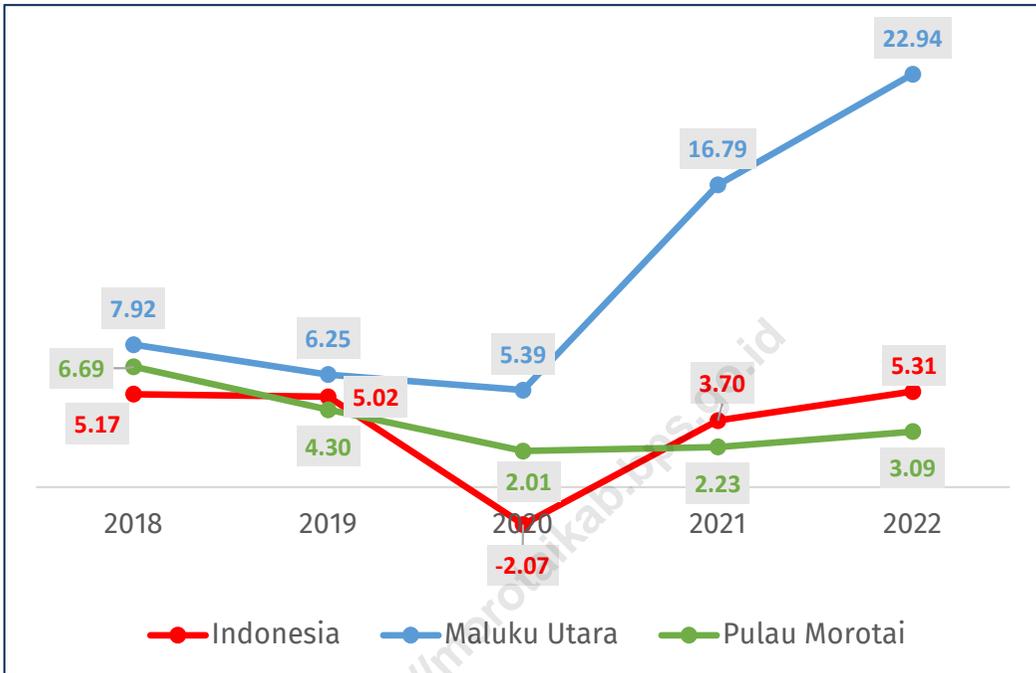
sektor pariwisata, pembangunan Pusat Usaha Layanan Terpadu (PLUT) pada tahun 2022, serta investasi yang dilakukan rumah tangga seperti penambahan kendaraan roda dua dan roda empat serta penambahan bangunan tempat tinggal pada tahun 2022. Selain itu, pembangunan RSUD baru di Kecamatan Morotai Jaya dan Penanaman Modal pada SKPT Morotai disinyalir memberikan dampak signifikan terhadap laju PMTB pada tahun 2022.

Selanjutnya, Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 21-24 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam melakukan realisasi anggaran juga cukup besar. Konsumsi pemerintah sering dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan kepada publik. Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap total PDRB sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021 akibat pengalihan anggaran konsumsi pemerintah menjadi untuk penanganan wabah COVID-19 serta kebijakan pemulihan ekonomi sehingga belanja pegawai dan belanja modal pemerintah seperti paket meeting dan perjalanan dinas sempat ditiadakan pada tahun 2020 dan 2021. Bagaimanapun juga, konsumsi pemerintah kembali meningkat pada tahun 2022.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Indikator ini juga secara kasar menggambarkan peningkatan taraf hidup yang diukur melalui peningkatan output riilnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan banyak berarti apabila tidak selaras dengan pertumbuhan penduduknya. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi seharusnya berada di atas pertumbuhan jumlah penduduknya.

Grafik 1.6 Perbandingan Laju Produk Domestik Regional Bruto Indonesia, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Morotai Menurut atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2018-2022



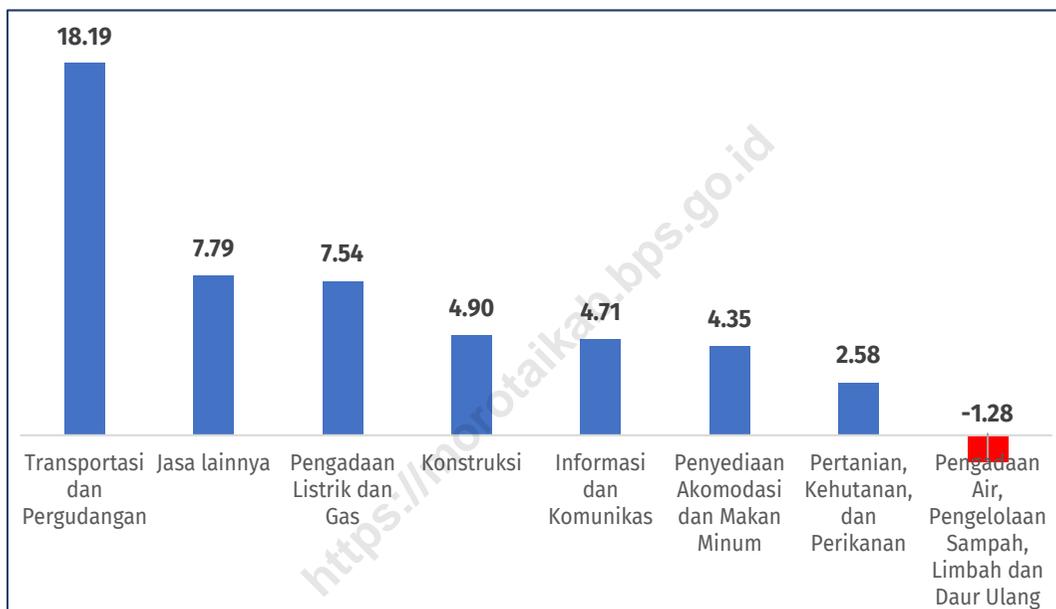
sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Meskipun dihadapkan pada tren perlambatan ekonomi global, pemulihan ekonomi terus melaju baik secara nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten pada tahun 2022. Dari grafik di atas, terlihat bahwa PDRB Pulau Morotai cenderung lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku Utara dan laju Nasional, kecuali pada tahun 2018 dan 2020. Meskipun demikian, PDRB perlahan meningkat pada tahun 2021 dan 2022.

PDRB Pulau Morotai tumbuh sebesar 3,09 persen, melesat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya tumbuh 2,23 persen. Pertumbuhan ekonomi sempat melandai sejak tahun 2019 yaitu 4,30 persen dari tahun sebelumnya 6,69 persen, hingga titik terendahnya yaitu 2,01 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021 PDRB perlahan merangkak hingga 2,23 persen dan akhirnya mencapai 3,09 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini merupakan ekspansi dari kinerja perekonomian yang didorong oleh longgarnya kebijakan pembatasan sosial berkala dalam rangka menghadapi era New Normal Covid-19. Selain itu, pengeluaran

pemerintah yang semakin longgar juga memicu stimulus bagi roda perekonomian sehingga menggerakkan lapangan usaha yang sebelumnya sempat berhenti beroperasi. Pertumbuhan ekonomi dapat diamati dari sisi produksi maupun pengeluaran.

Grafik 1.7 Laju Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Beberapa Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2022

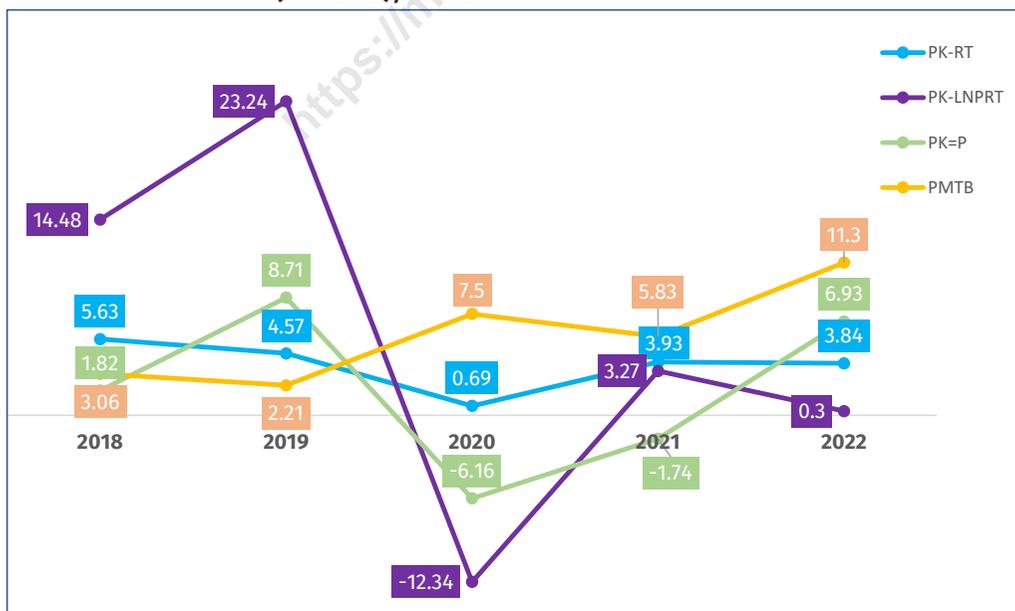


sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 terdapat pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 18,19 persen. Pertumbuhan ekonomi sektor ini didukung oleh kembali aktifnya moda transportasi udara dan laut sehingga meningkatkan jumlah penumpang maupun barang yang masuk maupun keluar Pulau Morotai. Selain itu, masuknya beberapa franchise jasa layanan kurir online berdampak positif terhadap perekonomian lapangan usaha ini. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua terdapat pada lapangan usaha Jasa Lainnya, yaitu sebesar 7,79 persen. Ini merupakan hal yang perlu dicermati mengingat kinerja Lapangan Usaha Jasa Lainnya konsisten menunjukkan tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Secara berurutan lapangan usaha yang memiliki laju tertinggi setelahnya adalah Pengadaan Listrik dan Gas (7,54 persen); Konstruksi (4,90 persen);

Informasi dan Komunikasi (4,71 persen); serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (4,35 persen). Di sisi lain, meskipun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Pulau Morotai, laju pertumbuhannya cukup rendah bahkan cenderung menurun setiap tahunnya, hingga mencapai 2,58 persen pada tahun 2022. Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah, hanya terdapat 1 dari 17 kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pada tahun 2022, yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, air hujan dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Meskipun kontribusinya kecil terhadap perekonomian, lapangan usaha ini kerap mengalami kontraksi selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai -1,28 persen pada tahun 2022.

Grafik 1.8 Laju Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulau Morotai Menurut Beberapa Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan (Persen), 2018-2022



sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari komponen pengeluaran. Pertumbuhan pada tahun 2022 paling besar dikontribusi oleh Konsumsi Akhir Pemerintah sebesar 6,93 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 11,30 persen. Hal ini dipicu oleh meningkatnya belanja pemerintah untuk program pemulihan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, dibukanya kembali perjalanan dinas dan paket meeting membuka peluang pemerintah untuk merealisasikan anggaran dengan lebih maksimal. Di sisi lain, Konsumsi Akhir Rumah Tangga dan LNPRT justru mulai mengalami penurunan. Hal ini salah satunya dipicu oleh seruan penghematan oleh Presiden RI pada triwulan kedua tahun 2022 yang menganjurkan masyarakat untuk berhemat dan menabung akibat ketidakpastian ekonomi global dan tingkat inflasi yang tinggi.

PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Pulau Morotai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, PDRB per kapita tercatat sebesar 21,94 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 22,35 juta rupiah.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2018-2022, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami fluktuasi. Nilai PDRB Per kapita sebesar 15,08 juta rupiah di tahun 2018 meningkat hingga mencapai 15,62 juta rupiah di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan mencapai 14,17 juta rupiah pada tahun 2022.

BAB 2

Pembangunan Sosial dan Manusia

<https://morotkab.brawijaya.ac.id>

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi saling terkait erat, tetapi keduanya memiliki fokus yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan dalam produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Hal ini sering diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan manusia, di sisi lain, menitikberatkan pada kualitas kehidupan manusia. Ini melibatkan aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, harapan hidup, akses terhadap layanan dasar, keamanan pangan, dan kesetaraan gender. Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kemampuan individu untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

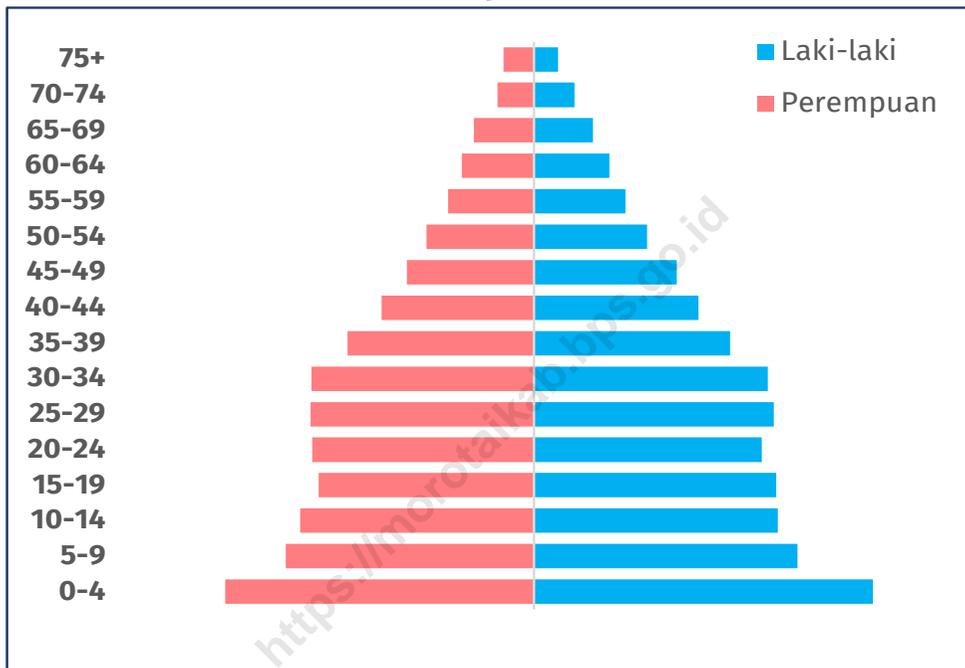
Pembangunan manusia yang meningkat cenderung memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Individu yang lebih terdidik, sehat, dan memiliki akses yang lebih baik ke layanan dasar cenderung lebih produktif. Mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi lebih banyak pada ekonomi, baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mendukung pembangunan manusia dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Dana yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur pendidikan, meningkatkan sistem kesehatan, dan menyediakan layanan publik yang diperlukan untuk memajukan kualitas hidup manusia.

Jadi, hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan sinergis. Pembangunan manusia yang baik dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu memfasilitasi pembangunan manusia yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Identifikasi kependudukan merupakan langkah awal penting dalam merancang kebijakan pembangunan manusia. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk suatu daerah, yang menjadi dasar perumusan kebijakan.

Pada tahun 2022, penduduk Pulau Morotai berjumlah 78.270 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pulau Morotai memiliki rasio jenis kelamin 106,48 persen, yang dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 106-107 jiwa laki-laki per 100 jiwa perempuan.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Pulau Morotai, 2022



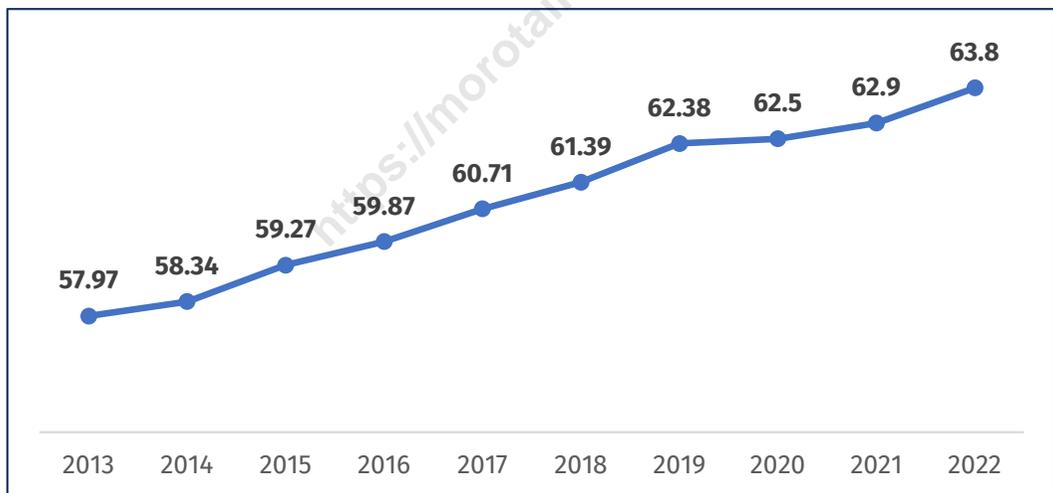
sumber: Proyeksi Penduduk, BPS Kabupaten Pulau Morotai

Piramida penduduk adalah representasi grafis dari struktur usia dan jenis kelamin dalam suatu populasi pada suatu titik waktu tertentu. Biasanya, piramida penduduk menggambarkan jumlah penduduk dalam kelompok usia tertentu (biasanya dalam kelompok lima tahunan) berdasarkan jenis kelamin. Grafik di atas menunjukkan bahwa Pulau Morotai memiliki piramida penduduk berbentuk kerucut, menandakan bahwa jumlah penduduk usia lanjut lebih sedikit dibandingkan penduduk usia produktif dan lebih muda. Hal ini juga dapat diinterpretasikan bahwa Pulau Morotai mengalami kondisi "Bonus Demografi", dimana jumlah penduduk usia produktif dalam suatu negara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia bergantung, seperti anak-anak dan lansia.

Bonus demografi dapat memberikan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi suatu wilayah karena lebih banyak orang yang bekerja dan berkontribusi pada ekonomi dibandingkan dengan jumlah orang yang bergantung pada mereka. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi, negara harus memiliki kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja bagi populasi usia produktif. Jika tidak, bonus demografi bisa berpotensi menjadi beban ekonomi jika tidak ada infrastruktur atau program yang cukup untuk menampung populasi tersebut.

Salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan sosial dan ekonomi suatu wilayah yang dapat mencerminkan kesejahteraan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ditinjau dari tiga sudut pandang kelayakan hidup, yaitu Kesehatan (Usia Harapan Hidup), Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran Per Kapita).

Grafik 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Morotai, 2013-2022

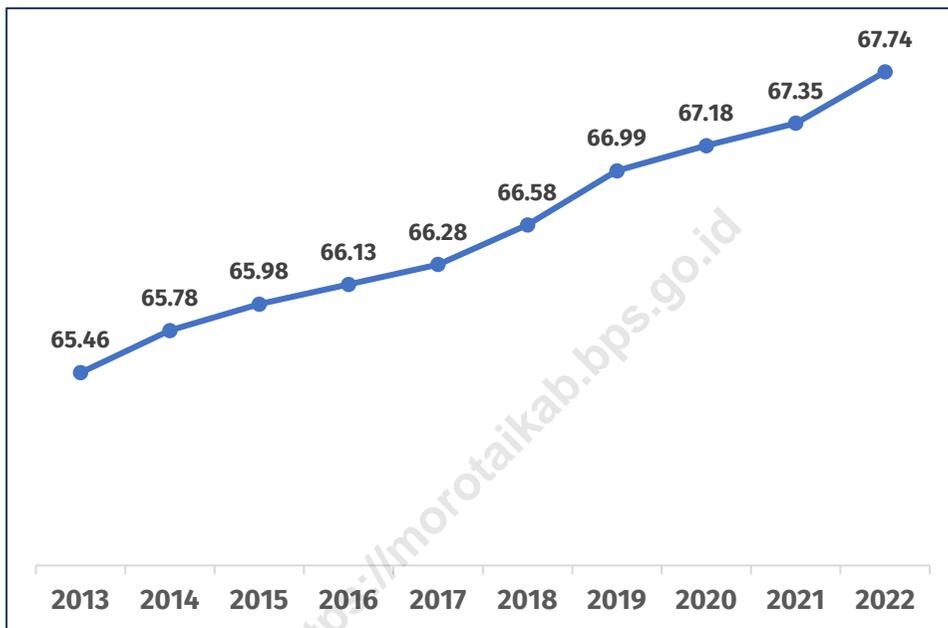


sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Dari grafik di atas, terlihat bahwa IPM Pulau Morotai cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir. Nilai IPM Pulau sebesar 63,8 memasuki kategori menengah, dimana telah mencapai sejumlah kemajuan dalam beberapa aspek kesejahteraan manusia. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam akses pendidikan, kesehatan, atau standar hidup.

Meskipun nilai IPM Pulau Morotai konsisten menempati ranking ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, laju pertumbuhan IPM Pulau Morotai termasuk yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara.

Grafik 2.3 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pulau Morotai (tahun), 2013-2022

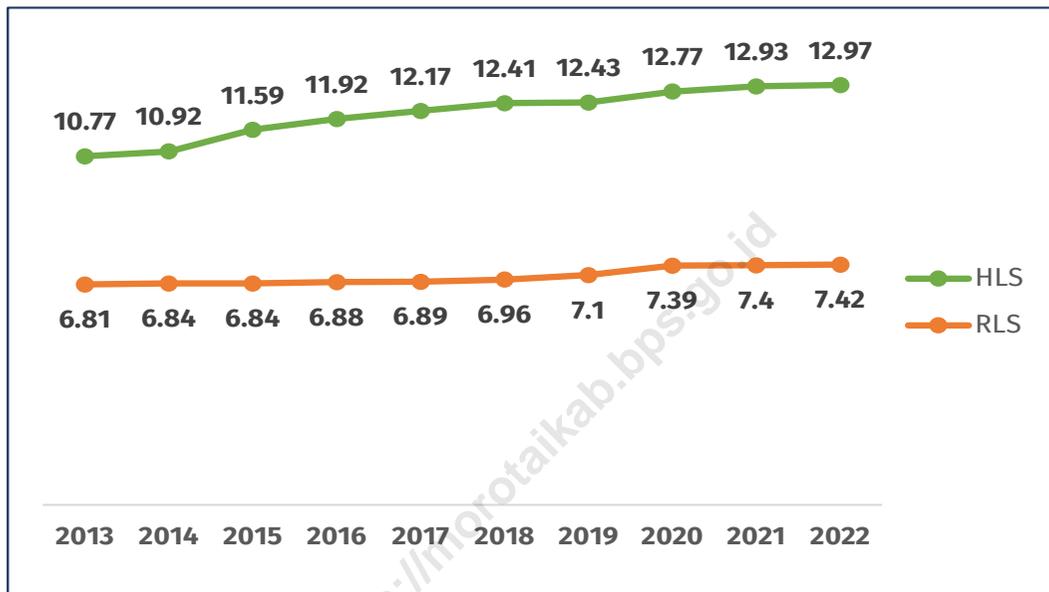


sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang akan hidup pada saat lahir di suatu wilayah pada waktu tertentu. Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait dalam mengukur kesejahteraan suatu wilayah. Wilayah yang memiliki UHH yang leboh tinggi cenderung memiliki nilai IPM yang lebih tinggi juga. Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, nutrisi yang baik, sanitasi yang layak, dan gaya hidup yang sehat berkontribusi pada peningkatan usia harapan hidup dan pada gilirannya dapat memengaruhi nilai IPM. Selama sepuluh tahun terakhir, UHH cenderung meningkat secara konsisten hingga mencapai 67,74 tahun. Nilai ini dapat dianggap moderat atau rata-rata dan bisa menandakan adanya kemajuan dalam kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan sanitasi. Bagaimanapun juga, perlu adanya upaya untuk meningkatkan UHH melalui investasi dalam

kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, nutrisi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas hidup.

Grafik 2.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pulau Morotai (tahun), 2013-2022



sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah dua konsep terkait dalam konteks pendidikan dan pembangunan manusia. Harapan Lama Sekolah merupakan perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang akan menghabiskan dalam pendidikan, biasanya diukur pada usia tertentu. Ini adalah proyeksi tentang berapa lama seseorang diharapkan untuk tetap berada dalam sistem pendidikan. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata tahun yang benar-benar dihabiskan seseorang dalam pendidikan. Kedua metrik ini penting dalam menilai akses terhadap pendidikan, tingkat partisipasi, dan tingkat pencapaian pendidikan dalam suatu populasi. Grafik di atas menunjukkan bahwa baik HLS maupun RLS mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir. HLS menunjukkan nilai 12,97 tahun yang menandakan bahwa setiap orang rata-rata diharapkan menghabiskan 12-13 tahun menempuh pendidikan (hingga minimal SMA maupun masuk

ke pendidikan tinggi). Bagaimanapun juga, RLS hanya menunjukkan nilai 7,42 tahun, menandakan bahwa penduduk Pulau Morotai rata-rata hanya menghabiskan 7,42 tahun untuk menempuh pendidikan (setara lulusan SD hingga SMP awal). HLS yang jauh lebih tinggi dari RLS mengindikasikan adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan dalam pendidikan dengan realitas atau tantangan dalam mencapainya, seperti *dropout* sekolah, akses terbatas terhadap pendidikan, kesenjangan ekonomi, masalah kualitas pendidikan, atau faktor-faktor sosial lainnya mungkin mempengaruhi kesenjangan ini. Perbedaan ini adalah poin penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pendidikan dan dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang ditujukan untuk meminimalkan kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pendidikan.

Grafik 2.5 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Riil Kabupaten Pulau Morotai (Ribu Rupiah/Orang/Tahun), 2013-2022



sumber: BPS Provinsi Maluku Utara

Pengeluaran per kapita memiliki hubungan yang kuat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun hubungan ini tidak selalu linier atau langsung. Pengeluaran per kapita dapat menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan IPM, tetapi faktor-faktor lain juga turut berperan. Wilayah dengan pengeluaran per kapita yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya bahkan dalam kualitas yang lebih baik untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, layanan

kesehatan, infrastruktur, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, Pengeluaran per kapita juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, lapangan kerja yang lebih baik, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi IPM melalui dampaknya pada kesejahteraan sosial dan kualitas hidup. Pengeluaran perkapita penduduk Pulau Morotai cenderung mengalami peningkatan selama 2013-2019. Bagaimanapun juga, saat pandemi covid-19 melanda penduduk mengencangkan arus pengeluaran untuk kondisi darurat, sehingga pengeluaran perkapita sempat terjun bebas pada tahun 2020 dan 2021. Setelah masa *New Normal* dimulai, pengeluaran perkapita kembali meningkat bahkan melebihi nilai tahun 2019. Meskipun terdapat korelasi positif, penting untuk dicatat bahwa korelasi antara pengeluaran per kapita dan IPM tidak selalu mengindikasikan sebab akibat. Artinya, peningkatan pengeluaran per kapita tidak selalu secara otomatis menghasilkan peningkatan nilai IPM. Terdapat faktor-faktor lain yang juga berperan, seperti kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan distribusi pendapatan yang dapat mempengaruhi nilai IPM.

Meskipun IPM adalah indikator yang berguna dalam mengukur kesejahteraan manusia, peningkatan nilai IPM tidak selalu bisa terjadi dengan cepat atau langsung. Beberapa aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, perubahan budaya, dan kesetaraan gender membutuhkan waktu lama untuk berubah karena melibatkan perubahan sosial yang kompleks. Dalam banyak kasus, peningkatan nilai IPM membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai sektor, baik itu pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini juga memerlukan komitmen jangka panjang untuk perubahan yang berkelanjutan dalam berbagai bidang yang memengaruhi kesejahteraan manusia.

Perkembangan Kemiskinan

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian maupun perumahan. Padahal, permasalahan kemiskinan kini lebih kompleks yaitu menyangkut pada kebutuhan sosial bermasyarakat, serta pada masalah informasi bahkan standar hidup yang memadai. Menurut CK Praland dalam

bukunya The Bottom of Pyramid, permasalahan kemiskinan yang dulunya dinilai hanya bersifat searah (sebab-akibat) kini dipandang sebagai permasalahan yang bersifat resiprokal (saling mempengaruhi), sehingga dalam ungkapan yang lebih spesifik, kemiskinan adalah salah satu akibat dari beragam akibat lain yang muncul akibat siklus perekonomian dan kemajuan sosial.

Sebagai permasalahan yang bersifat multi-dimensional, solusi untuk masalah kemiskinan seyogyanya juga bersifat multi-dimensional. Pemerintah menjadi pilar utama bangunan sosial-ekonomi yang mampu memayungi masyarakat dari bahaya kemiskinan. Artinya solusi yang dilakukan pemerintah hendaknya mampu meng-counter setiap excess yang ditimbulkan oleh kemiskinan di samping secara paralel mengurangi angka kemiskinan itu sendiri.

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Begitupula dengan Pulau Morotai yang kehilangan gairah perekonomian ketika pandemi Covid-19 menyerang sektor-sektor fundamental seperti sektor pariwisata, sektor transportasi dan pengangkutan, serta sektor pariwisata akibat program Penutupan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada macetnya perputaran ekonomi di Pulau Morotai. Hal ini juga berakibat langsung pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diberhentikan, serta tingginya frekuensi pengusaha gulung tikar pada tahun 2020 dan 2021. Bagaimanapun juga, tahun 2022 merupakan momentum bagi pemerintah untuk mengupayakan skema pemulihan untuk membangkitkan kembali arus ekonomi di Pulau Morotai. Namun demikian, situasi global yang belum menentu beserta tekanan inflasi yang menghantam harga komoditas di masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pemulihan ekonomi di tahun 2022.

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pulau Morotai, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	276.74	291.879	301.712

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,46	6,52	5,42
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,05	0,72	0,74
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,13	0,13
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	4,43	4,45	3,77
<i>Gini Ratio</i>	0,254	0,294	0,266

sumber: BPS Kabupaten Pulau Morotai

Penduduk miskin di Pulau Morotai relatif menurun pada tahun 2022 jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,77 ribu. Dengan kata lain, terdapat 5,42 persen penduduk miskin di Pulau Morotai. Kebijakan New Normal yang dimulai dari pelonggaran aktivitas sosial seperti penambahan frekuensi jadwal penerbangan dan transportasi laut menstimulasi pergerakan arus ekonomi di Pulau Morotai, yang kemudian berdampak pada lancarnya distribusi barang/jasa sehingga meningkatkan kembali konsumsi rumah tangga. Penyelenggaraan beberapa *event* seperti Morotai D'aloa Festival pada awal tahun 2022 juga memberikan efek pengganda bagi perekonomian sektor akomodasi dan makan/minum, sektor perdagangan, serta sektor transportasi.

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan garis kemiskinan per kapita per bulan selama tiga tahun terakhir, dari Rp291.879 pada tahun 2021 menjadi Rp301.712 pada tahun 2022. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Nilai ini sering kali didasarkan pada pengeluaran yang dianggap minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Penetapan nilai ini dipengaruhi

oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, permintaan kebutuhan, atau perubahan dalam standar hidup yang dianggap sebagai kebutuhan dasar. Peningkatan garis kemiskinan yang dipengaruhi inflasi tanpa peningkatan kemampuan beli penduduk menyebabkan semakin banyaknya penduduk yang berada di bawah batas garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk miskin akan meningkat. Bagaimanapun juga, data menunjukkan bahwa peningkatan garis kemiskinan berlawanan arah dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga serta standar hidup yang didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan sosial dan ekonomi yang memadai untuk mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin tinggi.

Meskipun persentase kemiskinan menurun, di sisi lain Indeks kedalaman Kemiskinan maupun Indeks Keparahan Kemiskinan tidak menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan justru terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 0,72 pada tahun 2021 menjadi 0,72 pada tahun 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) memberikan informasi terkait seberapa jauh pendapatan orang-orang miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, semakin besar kesenjangan antara orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan ambang batas kemiskinan. Indeks P1 senilai 0,72 berarti rata-rata pendapatan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 72% di bawah garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran yang memperhitungkan distribusi pendapatan di antara individu-individu yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin). Dalam konteks nilai indeks sebesar 0,13 ini menunjukkan bahwa rata-rata orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan berada sekitar 13% di bawah ambang batas kemiskinan. Tingkat 0,13 menunjukkan tingkat kemiskinan yang mungkin tidak ekstrem, namun masih menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang terkena dampak kemiskinan membutuhkan peningkatan pendapatan atau bantuan untuk mencapai kondisi yang lebih sejahtera. Nilai yang tidak berubah dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa struktur distribusi kesenjangan pendapatan penduduk miskin di Pulau Morotai tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari distribusi pendapatan, *Gini Ratio* menunjukkan penurunan hingga 0,266. Hal ini diinterpretasikan sebagai tingkat ketimpangan pendapatan yang berada di level sedang dan menunjukkan

bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan di populasi tersebut tidak terlalu ekstrem, tetapi masih ada ketimpangan yang terlihat. Nilai 0,2966 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan cenderung lebih merata dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimanapun juga, masih ada ketimpangan yang perlu diperhatikan. Penting untuk diingat bahwa nilai Gini ratio perlu dilihat dalam konteks data yang digunakan dan tidak selalu memberikan gambaran lengkap tentang ketimpangan. Tetapi, secara umum, semakin rendah nilai *Gini Ratio*, semakin merata distribusi pendapatan atau kekayaan dalam populasi tersebut.

Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

Tenaga kerja memiliki peran strategis dalam pembangunan terutama berperan untuk kegiatan produksi. Hanya saja dalam prosesnya, optimalisasi produktivitas tenaga kerja berbeda dibandingkan dengan optimalisasi faktor produksi atau sumber daya modal lainnya. Apabila peningkatan produktivitas sumber daya modal ditempuh melalui riset dan teknologi, maka proses peningkatan pada sumber daya manusia harus melewati jalan panjang yaitu berupa peningkatan pada aspek-aspek kehidupan yang ditempuh dengan perbaikan kualitas hidup terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan terutama dengan meningkatkan insentif dan memberikan jaminan/tanggung, permasalahan ketenagakerjaan masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan ini tidak bersifat lokal atau hanya terjadi di Pulau Morotai, melainkan berskala nasional. Beberapa di antaranya adalah permasalahan terkait pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja, serta minimnya lapangan usaha.

Masalah pengupahan cukup rumit dalam ketenagakerjaan. Keseimbangan antara tingkat upah yang layak bagi buruh dengan keuntungan optimum yang diinginkan pengusaha sulit tercapai. Di sisi lain, sistem pengupahan di Pulau Morotai masih menggunakan upah untuk status lajang sehingga akan menjadi kurang ketika upah yang diberikan digunakan untuk menghidupi sebuah keluarga.

Selain itu, konsep upah minimumpun seringkali berbeda dalam implementasinya bukan hanya untuk Pulau Morotai, namun secara nasional. Upah minimum hanya mampu diterapkan pada pekerja dengan

status pekerja formal namun sangat sulit diterapkan dalam pekerja informal. Tingginya jumlah pencari kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia membuat sebagian besar pekerja mau menerima upah di bawah tingkat upah minimum yang ditetapkan. Selain itu, minimnya jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja seringkali juga berdampak pada standar upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Pulau Morotai pada tahun 2022 adalah Rp2.862.231,00/bulan dari sebelumnya Rp2.721.530 pada tahun 2021, mengikuti standar UMK Provinsi Maluku Utara. Bagaimanapun juga, UMK tersebut masih jarang digunakan sebagai penetapan upah di Pulau Morotai.

Selain pada penentuan upah minimum, penurunan tingkat pengangguran serta peningkatan partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian juga menjadi fokus perhatian. Menurut teori ekonomi murni, pengangguran pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary unemployment*) artinya pengangguran terjadi karena tenaga kerja tidak mau bekerja pada sembarang tingkat upah tertentu. Jika seseorang mau bekerja apa saja pada tingkat upah berapa saja, maka pengangguran tidak akan terjadi.

Teori ekonomi juga meyakini bahwa pada dasarnya daerah memiliki tingkat pengangguran tinggi karena sedikitnya kesempatan kerja dan rendahnya penyerapan angkatan kerja. Untuk itu kiranya diperlukan apa yang disebut sebagai pengembangan spesialisasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pulau Morotai, 2022

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja	21.049	11.713	32.762
1. Bekerja	19.930	11.406	31.336
2. Pengangguran	1.119	307	1.426
II. Bukan Angkatan Kerja	4371	12.560	16.931

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sekolah	1.543	1.739	3.282
2. Mengurus Rumah Tangga	1.431	9.656	11.087
3. Lainnya	1.397	1.165	2.562
Total	25.420	24.273	49.693

sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional - Agustus 2022. BPS Kabupaten Pulau Morotai

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki hampir dua kali angkatan kerja perempuan di Pulau Morotai tahun 2022. Oleh karena itu, jumlah laki-laki yang bekerja dan menganggur juga lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perempuan berumur 15 tahun ke atas yang masuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja. Perempuan di Pulau Morotai masih identik dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi serta sebagian besar mengurus rumah tangga.

Tabel 2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Pulau Morotai, 2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
≤ Sekolah Dasar (SD)	17.137	278	7.723
Sekolah Menengah Pertama	4.060	78	4.442
Sekolah Menengah Atas	7.325	938	4.381
Perguruan Tinggi	2.814	132	385
Total	31.336	1.426	16.931

sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional - Agustus 2022. BPS Kabupaten Pulau Morotai

Pendidikan memegang peran krusial dalam mempersiapkan individu untuk

masuk ke pasar kerja yang kompetitif dan terus berubah. Pendidikan yang baik memberikan dasar keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki berbagai bidang kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan keterampilan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk berusia 15 tahun ke atas di Pulau Morotai memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD atau tidak bersekolah sehingga pekerja didominasi oleh kelompok tersebut dan paling banyak ditemukan sebagai nelayan dan petani baik sebagai pengusaha maupun pekerja. Di sisi lain, pengangguran paling banyak ditemukan pada penduduk yang memiliki ijazah terakhir SMA. Hal ini terjadi akibat tidak seimbangnya dinamika pasar kerja di Pulau Morotai, menyebabkan tidak sesuainya ketrampilan yang dimiliki lulusan SMA dengan upah yang ditawarkan dalam pasar tenaga kerja Pulau Morotai.

Grafik 2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pulau Morotai, 2018-2022



sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional - Agustus 2022. BPS Kabupaten Pulau Morotai

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan proporsi dari populasi yang berusia kerja (biasanya dalam rentang usia tertentu, misalnya 15-64 tahun) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. TPAC adalah indikator

penting dalam memahami seberapa besar potensi tenaga kerja dalam suatu wilayah. TPAK Pulau Morotai Tahun 2022 sebesar 65,93 menunjukkan bahwa dari total populasi penduduk berusia kerja, sekitar 65-66 persen dari populasi tersebut terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun yang secara aktif mencari pekerjaan. Nilai ini menunjukkan bahwa Pulau Morotai memiliki potensi tenaga kerja yang cukup. Bagaimanapun juga, TPAK menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya potensi penurunan partisipasi dalam angkatan kerja. Namun jika dilihat dalam lima tahun terakhir, TPAK sangat berfluktuatif. Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor perubahan kondisi ekonomi, kondisi demografis, perubahan kebijakan ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengacu pada persentase dari angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun tidak berhasil menemukan pekerjaan. Pengangguran terbuka adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Penyebab tingkat pengangguran terbuka bisa bermacam-macam, termasuk kondisi ekonomi yang buruk, kurangnya kesempatan kerja dalam industri tertentu, kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, atau adanya masalah struktural dalam pasar kerja. TPT Pulau Morotai mengalami penurunan dari 6,27 persen pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 4,35 persen pada tahun 2022. Setelah pandemi covid, banyak wilayah yang mengalami peningkatan tingkat pengangguran akibat banyak bisnis terpaksa tutup sementara, industri pariwisata terhenti, dan sektor-sektor lainnya mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Bagaimanapun juga, kebijakan New Normal seperti vaksinasi dan peningkatan langkah-langkah pengendalian pandemi mendorong pembukaan kembali bisnis, restoran, dan industri lainnya sehingga membantu menciptakan kembali lapangan kerja yang hilang selama masa lockdown. Selain itu, sebagian besar angkatan kerja yang menganggur mulai beradaptasi dengan situasi baru, sehingga memungkinkan membuat pekerjaan baru dari rumah, baik itu freelance maupun berusaha.

BAB 3

KEUANGAN DAERAH

<https://www.gurubps.go.id>

Tinjauan Keuangan Daerah

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (value for money) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP. Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi :

1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah. APBD adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode, yang biasanya satu tahun. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, dan belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pemerintahan maupun pembangunan daerah. Penerimaan daerah Kabupaten Pulau Morotai selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, mendorong peningkatan besaran APBD yang diterima oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah, sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengelola anggaran tersebut secara tepat, karena dalam era desentralisasi fiskal ini, penerimaan daerah merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Penerimaan daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain yang sah. Perkembangan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Pulau

Morotai secara umum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan yang besar ini tidak lain adalah disebabkan meningkatnya sumber penerimaan daerah dari dana perimbangan (DAU & DAK).

Bila dilihat menurut komponen atau sumber penerimaan daerah, maka komponen terbesar dari penerimaan daerah adalah dana perimbangan yang berupa DAU, BHPBP, dan DAK yang memiliki kontribusi sekitar 84% dari penerimaan daerah. Sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sekitar 4,81%. Rendahnya proporsi penerimaan PAD dibandingkan dengan DAU mengindikasikan belum optimalnya pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menggali sumber-sumber penerimaan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah antara lain adalah:

1. Tingkat hidup dan ekonomi masyarakat masih rendah
2. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Tabel 3.1 Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Miliar Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)
PAD	23,32 M	39.21
Dana Perimbangan	800,35 M	105.30
Lainnya	49,23 M	113.46
Jumlah	872,89 M	101.16

sumber: DJPK Kemenkeu, data realisasi APBD murni s.d. Desember 2022

Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004 komponen PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan secara

umum pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022

PAD	Penerimaan (Miliar Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)
Pajak Daerah	4,34 M	26.31
Retribusi	14,58 M	42.17
Bagi Hasil	0,22 M	0
Lain-lain PAD	4,18 M	49.82
Jumlah	23,32 M	39.21

sumber: DJPK Kemenkeu, data realisasi APBD murni s.d. Desember 2022

Jumlah keseluruhan dana APBD baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan menjadi sumber pembiayaan daerah dalam melakukan pembangunan daerah, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Besarnya total belanja tidak terlepas dari bagaimana kondisi belanja masing-masing daerah. Adanya perbedaan potensi, kondisi dan kebijakan dari masing-masing daerah, mengakibatkan prioritas pembangunan dari masing-masing daerah juga berbeda.

Tabel 3.3 Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Jumlah
(1)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	117.27 M
Belanja Subsidi	2,20 M
Belanja Hibah	0,34 M
Belanja Bantuan Sosial	6,42 M
Belanja Tak Terduga	1,44 M
Belanja Bagi Hasil	2,50 M
Belanja Bantuan Keuangan	104,37 M
A. Belanja Langsung	780.49 M
Belanja Pegawai	183,78 M
Belanja Barang dan Jasa	210,83 M
Belanja Modal	385,88 M
Jumlah	897.76 M

sumber: DJPK Kemenkeu, data realisasi APBD murni s.d. Desember 2022

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

Jl. Raya Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai
Telp. (0923) 2221133, Homepage: <http://morotai.kab.bps.go.id/>
Email : bps8207@bps.go.id